

## Urgensi Politik Identitas Terhadap Demokrasi Negara Pancasila

Sri Yunita<sup>1</sup> Andini Zahra<sup>2</sup> Nurul Aliyyah<sup>3</sup>

Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,  
Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [sr.yunita@unimed.ac.id](mailto:sr.yunita@unimed.ac.id)<sup>1</sup> [andinizahra748@gmail.com](mailto:andinizahra748@gmail.com)<sup>2</sup> [nurulaliyyah2004@gmail.com](mailto:nurulaliyyah2004@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku, bahasa, agama, ras. Indonesia merupakan negara demokrasi dimana sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa politik, ada banyak oknum yang membuat identitas politik yang membuat masyarakat menjadi emosional dalam hak politiknya khususnya pada pemilu. Politik identitas ini mengancam negara Indonesia yang memiliki sistem demokrasi serta mengancam nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah mengetahui pengaruh identitas politik dan apa hubungannya dengan demokrasi dan nilai-nilai Pancasila Indonesia, serta bagaimana solusi dari permasalahan dalam artikel ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian teoritis yaitu dengan mengumpulkan studi literatur dan memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Politik identitas membuat pengaruh yang sangat besar terhadap demokrasi di Indonesia karena merupakan negara yang multikultural. Bukan hanya demokrasi, politik identitas juga mengancam nilai-nilai Pancasila. Solusi yang diberikan pada artikel ini adalah memberikan Pendidikan tentang politik identitas sehingga tidak terpengaruh dengan politik identitas.

**Kata Kunci:** Politik Identitas, Demokrasi, Pancasila



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Oleh karena itu maka muncul politik identitas yang sudah marak di Indonesia. Politik identitas yang paling sering digunakan di adalah politik identitas agama (Islam). Agama yang paling banyak dianut oleh warga Indonesia sendiri adalah Islam, maka dari itu tidak heran jika banyak yang memakai politik identitas di Indonesia. Politik identitas islam itu sendiri menuai pro-kontra yaitu antara memilih agama dan negara. Selain politik identitas agama, banyak juga yang menggunakan politik identitas suku, karena Indonesia terdiri dari banyak suku. Politik identitas suku juga menuai pro-kontra yang memilih antara solidaritas rasa kekeluargaan atau negara. Politik identitas agama dan suku biasanya digunakan dalam pertarungan politik, khususnya pemilu.

Fenomena politik identitas diatas adalah ancaman besar bagi Indonesia sebagai negara demokrasi yang berlandaskan ideologi Pancasila, karena masih belum sepenuhnya masyarakat Indonesia memahami tentang pendidikan politik dan kewarganegaraan. Sehingga, masyarakat Indonesia menjadi bersikap emosional dalam permainan politik identitas. Di sisi lain juga, politik identitas juga digunakan untuk kepentingan suatu kelompok dalam kepentingan golongannya sendiri. Pada penelitian (Wingarta et al., 2021), membahas tentang bagaimana pengaruh dan solusi politik identitas dengan demokrasi di Indonesia, sedangkan pada artikel ini penulis bukan hanya membahas tentang pengaruh politik identitas dalam demokrasi tetapi juga pengaruh politik identitas terhadap nilai-nilai Pancasila yakni dasar negara Indonesia. Berdasarkan latar belakang terkait dengan politik identitas, maka rumusan permasalahannya adalah "Urgensi politik identitas terhadap demokrasi negara Pancasila?" sehingga muncul pertanyaan berikut ini: Bagaimana pengaruh politik identitas terhadap demokrasi di

Indonesia? Bagaimana pengaruh politik identitas terhadap nilai-nilai Pancasila? Kapan politik identitas dipraktikkan? Bagaimana solusi politik identitas tetap berpegang pada demokrasi dan nilai Pancasila Indonesia?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian teoritis, dan metode yang digunakan adalah metode studi literasi dengan analisis teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dan berdasarkan studi literatur. Penelitian ini dimulai dengan mempelajari masalah tersebut, mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan masalah tersebut, dan kemudian menghubungkan teori-teori tersebut untuk memberikan jawaban. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat bahan penelitian

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demorasi Di Indonesia**

Politik identitas sebagaimana definisi politik yaitu memperjuangkan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana, namun dengan menggunakan strategi dan kontestasi ikatan simbol kultural primordial (agama, kesukuan, kedaerahan, ras). Strategi politik yang menitikberatkan pada pembedaan (*disidentify kasi*) dan pemanfaatan (*utilisasi*) ikatan primordial merupakan pengertian politik identitas secara sederhana (Widjaja et al., 2021). Indonesia merupakan negara demokrasi yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Kemunculan politik identitas mengancam hukum di Indonesia yang bersifat demokrasi. Politik identitas membuat hukum dan demokrasi di Indonesia menjadi lemah dan bertentangan dengan etika politik. Masyarakat yang belum sepenuhnya demokrasi dan mempertahankan negara adalah salah satu sebab identitas politik tersebut muncul. Demokrasi yang berjalan hingga saat ini masih bersifat "eksklusif" dan "transaksional", belum "transformasional". Penegakan hukum yang lemah, kesadaran bela negara yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, serta literasi medsos yang rendah, adalah faktor pendorong yang menyebabkan banyaknya politik identitas di Indonesia (Wingarta et al., 2021). Masyarakat Indonesia banyak yang menganut agama Islam. Ada Sebagian warga yang menerima dan menolak system demokrasi di Indonesia. Presiden ke 4, yakni Abdurrahman Wahid menerima secara mutlak system demokrasi Indonesia. Sedangkan Jalaludin Rahmat memandang demokrasi sebagai kebebasan berbicara, persamaan hak politik serta sama di mata hukum. Tetapi ia tetap memamdang Islam ada ditangan Tuhan dan demokrasi itu sendiri ada ditangan rakyat (Anam, 2019). Dengan demikian ada pengaruh yang sangat besar terhadap demokrasi jika politik identitas semakin banyak di Indonesia.

##### **Pengaruh Politik Identitas Terhadap Nilai-Nilai Pancasila**

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan bersifat multikultural sudah pasti memiliki keanekaragaman identitas suku bangsa, etnis, agama, hingga adat istiadat. Secara singkat, politik identitas ini adalah haluan politik dengan identitas tertentu. Politik identitas terkadang menyalahkan orang lain yang dianggap tidak setuju dengan keyakinannya dan juga digunakan untuk menjegal pihak-pihak tertentu. Secara konseptual, politik identitas adalah politik liberal yang dibuat berdasarkan keinginan individu. Strategi dan kontestasi ikatan kultural seperti agama, kesukuan, kedaerahan, dan ras digunakan dalam politik identitas untuk menentukan siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Politik kebangsaan tidak lagi bergantung pada kepentingan sektoral, kelompok, atau khusus. Pada akhirnya, "kecurigaan" akan muncul jika virus politik identitas digunakan sebagai strategi global untuk melumpuhkan kekuatan yang dianggap mengancam dominasi sosial, politik, dan ekonomi

mereka. Ideologi Pancasila, yang merupakan kesepakatan nasional, telah digunakan untuk memanipulasi politik negara dan kebangsaan untuk kepentingan pemilih. Individu dan kelompok dari berbagai latar belakang senang menggunakan identitas sebagai alat politik untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka mengabaikan politik kenegaraan dan kebangsaan yang didasarkan pada ideologi Pancasila. Tanpa mengindahkan rasa tepo seliro (untuk memahami), yang dimiliki para pendiri bangsa saat mereka berjuang dan bekerja, berdialektika untuk merumuskan, menyepakati, dan menerima Pancasila sebagai ideologi negara, pembesaran logika politik identitas yang terlalu terbatas telah digunakan. Penyimpangan dalam penggunaan politik identitas yang dicoba digunakan oleh beberapa elit politik dari kelompok-kelompok yang telah dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dan telah mengadopsi ide-ide dari sumber luar untuk kepentingan jangka pendek dan sekaligus untuk menghidupkan kembali ilusi politik yang telah lama tertanam dalam diri mereka (Perdana & Hi, 2024). Meskipun pluralisme bangsa Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem demokrasi, itu harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, negara harus segera mendukung ideologi "Pancasila". Satu-satunya cara untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan politik negara dan kebangsaan adalah melalui gagasan "Politik Kebhinnekaan", yang berfungsi sebagai antitesis dari "Politik Identitas", yang lebih rentan untuk disalahgunakan oleh para elit politik yang tidak memahami semangat dan jiwa nasionalisme kita (Al- Farisi, 2018).

### **Praktik Politik Identitas**

Tidak hanya politik identitas tetapi juga praktik politik uang yang semakin marak dalam pemilihan telah menyebabkan penilaian negatif terhadap demokrasi Indonesia. Politik uang sangat merugikan demokrasi karena dapat mengaburkan prinsip pemilihan yang jujur dan adil. Sebenarnya, politik identitas dapat bermanfaat dan berguna untuk mewujudkan kesempatan yang sama bagi semua orang di bidang pendidikan, ekonomi, politik, atau bahkan pemerintahan. Karena banyaknya kejadian yang terjadi di antara mayoritas dan minoritas pada keyantaannya, identitas menjadi faktor utama dalam diskriminasi yang mengurangi peluang. Tidak hanya politik identitas yang berperan dalam pemilihan, tetapi juga politik uang yang berperan dalam pemilihan, yang menentukan siapa yang akan mendapatkan suara terbanyak (Surya et al., 2021). Praktik politik identitas banyak muncul pada masa politik yaitu pemilihan presiden sampai kepala daerah. Pada dasarnya tujuan kampanye politik adalah memengaruhi pemilih untuk mengarahkan dukungan dan menjatuhkan pilihan pada kandidat tertentu pada saat pemilihan umum. Sehingga untuk mendapatkan suara terbanyak maka politik identitas pada kontestasi pemilu adalah sebagai "jalan pintas" untuk memperoleh suara secara "murah dan meriah" dan bahkan lebih jahat namun juga efektif daripada politik uang.

### **Solusi Politik Identitas Tetap Berpegang Pada Demokrasi Dan Nilai-Nilai Pancasila**

Politik identitas harus diubah menjadi politik kebangsaan yang tidak lagi berfokus pada kepentingan kelompok, sektoral, atau partikularistik. Ini karena politik kebangsaan dan nasionalisme yang didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara adalah pengejawantahan dari politik kebhinnekaan yang mengutamakan kesatuan daripada keragaman. Dibutuhkan kesepakatan untuk memastikan bahwa Indonesia adalah milik bersama, menghapus prinsip dominasi atas apapun, kesetaraan dalam kemanusiaan, keamanan dan kesejahteraan umum bagi semua orang, dan kedamaian atas prinsip tepo seliro yang didasarkan pada ideologi Pancasila, yang akan memayungi keragaman dalam politik kebangsaan dan politik kenegaraan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa mempertimbangkan afiliasi SARA. Media sosial memiliki kemampuan untuk "mempertajam perpecahan bangsa" dan "menimbulkan krisis

kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi." Pendidikan politik dan prinsip demokrasi Pancasila terpengaruh oleh perilaku masyarakat yang kurang sadar politik saat berinteraksi di sosial media. Realitas politik seperti itu merupakan "warning awal" bagi demokrasi Indonesia dan peringatan keras tentang fondasi persatuan dan kesatuan bangsa yang semakin memudar. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang mendukung "budaya demokrasi" yang sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila. Pemerintah Indonesia, termasuk Kemendagri dan Kemenkominfo, serta pemimpin partai politik, harus bekerja sama untuk meningkatkan edukasi politik, terutama literasi politik dan literasi digital, untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis masyarakat. Selanjutnya, pemerintah harus memperjelas undang-undang dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap penyebaran konten politik identitas yang menggunakan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) dalam pemilihan di semua tingkat, baik secara lisan maupun tertulis, serta di media lainnya (Wingarta et al., 2021). Selain itu perlu diberikan Pendidikan sejak usia dini khususnya disekolah untuk tidak terpengaruh dengan politik identitas yang sangat mengancam demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, Penguatan Profil Pelajar Pancasila juga diharapkan dapat menjadi sarana yang optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Utami et al., 2023).

## KESIMPULAN

Demokrasi memiliki pengaruh yang besar terhadap politik identitas yang semakin marak di Indonesia hal ini dikarenakan demokrasi yang berjalan di Indonesia belum "transformasional" dan juga beberapa faktor pendorong yang ada. Saat ini individu dan kelompok menggunakan Ideologi Pancasila untuk memanipulasi politik negara dan kebangsaan hanya untuk kepentingan pemilih dengan politik identitaslah sebagai alat politik untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Gagasan "politik kebhinekaan" menjadi cara agar dapat memasukkan nilai-nilai Pancasila ke kehidupan politik negara dan kebangsaan. Banyak masyarakat yang kurang sadar politik saat berinteraksi di sosial media, sehingga menjadi peringatan awal bagi demokrasi Indonesia dan fondasi persatuan kesatuan bangsa yang semakin memudar. Kita harus bekerja sama dalam meningkatkan edukasi politik terutama literasi politik dan digital guna meningkatkan kualitas dan kapasitas pengetahuan serta kemampuan berpikir kritis masyarakat. Tidak hanya untuk masyarakat melainkan juga disekolah, yakni perlu adanya penguatan profil pelajar Pancasila agar peserta didik tidak terpengaruh oleh politik identitas dan dapat berkompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Setelah ini diharapkan akan ada penelitian yang membahas apakah edukasi politik dimasyarakat meningkatkan kualitas dan kapasitas berpikir kritis masyarakat? lalu apakah penguatan profil pelajar Pancasila yang diberikan kepada peserta didik membuat mereka menjadi berkompetes, berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farisi, L. S. (2018). Politik Identitas: Ancaman Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Pancasila. *Jurnal Aspirasi*, 2, 77–90.
- Anam, H. F. (2019). Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia. *Politea*, 2(2), 181. <https://doi.org/10.21043/politea.v2i2.5953>
- Perdana, A. P., & Hi, M. S. (2024). Mendatang Impact of Identity Politics in the Future 2024 General. *Jurnal Kelitbangan: Inovasi Pembangunan*, 11(2), 225–238.
- Surya, D. A., Noerzaman, A., & Usni, U. (2021). Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkada. *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 2(2), 29. <https://doi.org/10.24853/independen.2.2.29-36>
-

- Utami, F. H., Yanzi, H., & Nurhayati. (2023). Pengaruh Proyek Teater dan Poster Terhadap Penguatan Profil Pelajar Pancasila. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(1), 23–30.
- Widjaja, P. S., Wibowo, D. P. A., & Geovasky, I. (2021). Politik Identitas dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila di Ruang Publik. *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian*, 6(1), 95.  
<https://doi.org/10.21460/gema.2021.61.658>
- Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (2021). The Influence of Identity Politics on Indonesian Democracy. *Jurnal Lemhanas RI*, 9(4), 121–121.